

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEADILAN

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya. Secara umum, penjatuhan pidana oleh hakim memang cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Paradigma ini tentu tidak cocok saat menghadapi kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Sebab dalam penyalahgunaan narkotika, pelaku (pecandu narkotika) tidak hanya diposisikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena selain jenis penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dimana pendekatan perundang-undangan hukum pidana dan khususnya perundang-undangan narkotika mutlak dijadikan sebagai salah satu pendekatan penelitian hukum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan pelaksanaan sanksi pidana pengguna narkoba yang tidak terkait jaringan narkotika dalam PerUndang-Undang saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri adalah termasuk dalam tipologi korban "*self victimizing victims*" yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.. (2) Pengaturan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika menurut Undang-Undang saat ini belum berbasis nilai keadilan. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya khususnya terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. (3) Rekonstruksi ideal formulasi dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika yang berbasis nilai-nilai keadilan yaitu dengan mengubah rumusan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) dan pasal 103 ayat (1).

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pengguna Narkotika, Keadilan

RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST NARCOTICS USERS BY LAW NUMBER 35 OF 2009 ARE BASED ON VALUES OF JUSTICE

ABSTRACT

The abuse of narcotics as referred to in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides quite heavy criminal sanctions, however, in reality the perpetrators of crime are actually increasing, and for the convicts in reality it is not a deterrent and there is a tendency to repeat it again. This can be caused by a factor in the imposition of a crime by a judge who does not have an impact on the perpetrators. In general, the imposition of a crime by judges tends to prioritize criminal sanctions that are commensurate with the actions of the perpetrators, with the aim that the perpetrators do not repeat their actions. This paradigm is certainly not suitable when dealing with crimes involving drug abuse. Because in narcotics abuse, perpetrators (narcotics addicts) are not only positioned as perpetrators of crimes, but also as victims.

This research uses a statutory approach. The statutory approach was chosen because in addition to this type of research, it is included in normative legal research where the approach to criminal law legislation and especially narcotics legislation is absolutely used as one of the legal research approaches.

The results of this study conclude that (1) The policy of implementing criminal sanctions for drug users that are not related to narcotics networks in the current legislation cannot be separated from the criminal system adopted by the legal system in Indonesia. The purpose of the criminal system is essentially the operation of law enforcement carried out by the judicial system based on legal instruments that regulate the criminalization of drug abuse and illicit trafficking, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics abusers for themselves are included in the typology of "self-victimizing victims" namely victims of crimes they commit themselves. (2) The regulation on the implementation of criminal sanctions against narcotics users who are not related to the narcotics distribution network according to the current law is not yet based on values. Justice. This can be seen from Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which still causes multiple interpretations or ambiguities in its application, especially to Article 112 and Article 127 of the Narcotics Law. (3) The ideal reconstruction of the formulation in the implementation of criminal sanctions against narcotics users based on the values of justice is by changing the formulation of Article 111 paragraph (1) and 112 paragraph (1) and Article 103 paragraph (1).

Keywords: Criminal Sanctions, Narcotics Users, Justice